▶ Laporan Terkini ... hal 3
Malam Penganugerahan MDGs Awards 2011

▶ Laporan Terkini ... hal 4
NAWASIS, Integrasi Sistem Monitoring AMS

▶ Profil ... hal 6
Menengok Pengusaha Sanitasi Desa Karang Bayan

Januari 2012

Newsletter AMPL

MEDIA INFORMASI KELOMPOK KERJA AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN

WASH UNICEF

Anggarkan 1 Miliar

Di awal tahun 2012 Program WASH UNICEF merencanakan membelanjakan dana sebesar Rp 1 miliar. Dana ini akan dipergunakan di lima elemen program yaitu penguatan kelembagaan, STBM, sanitasi sekolah, kawasan kumuh perkotaan, dan manajemen pengetahuan. Porsi terbesar kegiatan Kuartal 1 (Q1) 2012 dialokasikan pada penanganan kawasan kumuh perkotaan, khususnya di Jakarta Barat, yang rencananya akan menghabiskan Rp 400 juta.

Seluruh kegiatan diharapkan dapat berkontribusi langsung terhadap pencapainya target CPAP 2011-2015 dimana pada Juni 2013, ditargetkan sebanyak 25% tambahan dari rumah tangga miskin di kabupaten/kota dapat memiliki akses berkelanjutan ke layanan *Water Sanitation Hygiene* (WASH).

Untuk mendapat masukan dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat, pada Selasa (17/1/2011) diselenggarakan pertemuan pembahasan usulan Rencana Kerja Q1 Program WASH UNICEF. Acara lintas kementerian ini dihadiri 20 orang peserta diantaranya perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, UNICEF, Sekretariat STBM, dan Sekretariat WASH UNICEF.

Salah satu sumber air di daerah Nusa Tenggara Timur
foto: www.cefil.info

Maraita Listyasari, dari Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas, mengajak peserta di pertemuan *kick-off* ini untuk mendorong terciptanya sinergi antar program di masing-masing kementerian dengan program WASH UNICEF. Pada pertemuan ini masih terbuka kesempatan untuk mengusulkan gagasan dan masukan karena status usulan masing-masing kegiatan belum final.

... hal 2

224 Kabupaten/Kota Mengikuti PPSP 2012

PPSP Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman

Sejak akhir tahun 2011, PMU-PIU PPSP telah menyepakati Rencana Pengelolaan Program tahun 2012. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dinamika proses yang berkembang baik pada tataran penyelenggara PPSP di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, informasi yang tertera dalam rencana ini, terutama mengenai waktu dan penanggung jawab, akan menjadi agenda kerja bersama bagi para penyelenggara kegiatan.

... hal 2

WASH UNICEF, Anggaran... *dari hal 1*

Mencermati perkembangan program di tahun 2011, Program WASH dapat menyerap anggaran sekitar Rp 2 miliar. Nilai ini lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Rp 1,6 miliar. Selisih ini lebih disebabkan karena meningkatnya dukungan WASH pada kegiatan yang berskala nasional.

Dari sisi substansi, dukungan program WASH di tahun 2011 diberikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu catatan keberhasilan di tingkat daerah adalah disahkannya Perda AMPL di Kabupaten Bima, NTB dan Pergub Provinsi NTT yang mendorong setiap kabupaten/kota membentuk Pokja AMPL dalam mengelola pembangunan sektor AMPL di wilayahnya.

Program WASH telah memasuki paruh kedua dari kerjasama lima tahunannya. Berkaca pada implementasi program di tahun 2011, beberapa hal yang menjadi masukan untuk dilaksanakan di tahun 2012 adalah peningkatan peran Pokja Provinsi dan digalakkannya pembelajaran antar-wilayah (*horizontal learning*).

Selain itu, perlu ditingkatkan pendokumentasian hasil pembelajaran sebagai bahan pembelajaran dan dasar bagi penyusunan strategi advokasi (kebijakan dan anggaran) berbasis bukti. Pengembangan sistem Monev dengan menggunakan konsep *Sanitation Marketing* dan pengupayaan keterlibatan Pokja AMPL dalam sistem penanganan bencana alam nasional, juga merupakan salah satu hal yang akan ditingkatkan dalam pelaksanaan program di tahun 2012. Hal ini selaras dengan kesepakatan pada KSAN 2011.

Pada Februari 2012, akan digelar lokakarya rencana kerja tahunan program WASH oleh UNICEF.

Hoferdy – Sekt. WASH UNICEF

224 Kabupaten/Kota... *dari hal 1*

Kabupaten/Kota Peserta PPSP Tahun 2012

Kab. Pidie Jaya	Kab. Batang	Kab. Tulung Agung	Kota Bau Bau	Kab. Kolaka
Kab. Aceh Selatan	Kab. Rejang Lebong	Kab. Demak	Kab. Trenggalek	Kab. Pekalongan
Kota Sabang	Kab. Bengkulu Utara	Kab. Grobogan	Kab. Lamongan	Kota Kotamobagu
Kab. Aceh Utara	Kota Bengkulu	Kab. Pati	Kab. Badung	Kab. Manggarai
Kab. Merangin	Kab. Kaur	Kab. Temanggung	Kab. Klungkung	Kab. Ngawi
Kab. Sarolangun	Kab. Indramayu	Kab. Karanganyar	Kab. Lombok Tengah	Kab. Kep. Sangihe
Kota Sungai Penuh	Kab. Pringsewu	Kota Magelang	Kab. Dompu	Kab. Karawang
Kota Binjai	Kab. Mesuji	Kab. Magelang	Kota Bima	Kab. Minahasa Utara
Kab. Pinrang	Kota Pacitan	Kota Yogyakarta	Kab. Tana Tidung	Kota Majene
Kab. Solok	Kab. Tangerang	Kab. Kulon Progo	Kab. Tapin	Kab. Polewali Mandar
Kab. Lima Puluh Kota	Kab. Majalengka	Kab. Jember	Kab. Banjar Baru	Kab. Mamasa
Kab. Empat Lawang	Kab. Bogor	Kab. Pamekasan	Kab. Tabalong	Kab. Mamuju Utara
Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Kab. Manggarai Timur	Kab. Boolang Mongondow Selatan	Kab. Lampung Selatan	Kab. Sumba Barat Daya
Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Kab. Minahasa Tenggara	Kab. Hulu Sungai Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	Kab. Halmahera Selatan
Kab. Ogan Komering Ilir	Kab. Lampung Tengah	Kab. Padang Pariaman	Kota Bandar Lampung	Kab. Halmahera Barat
Kota Pematang Siantar	Kab. Boolang Mongondow Utara	Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bulongan	Kab. Mamuju
Kab. Ogan Ilir	Kab. Bekasi	Kab. Banyuwangi	Kab. Soppeng	Kab. Waropen
Kab. Musi Banyuasin	Kab. Wonosobo	Kab. Sumenep	Kab. Barru	Kab. Asmat
Kab. Bangka Selatan	Kab. Pemalang	Kab. Bondowoso	Kab. Sinjai	Kab. Rote Ndao
Kab. Bangka Barat	Kota Salatiga	Kab. Lumajang	Kab. Maros	Kota Kendari
Kota Lubuk Linggau	Kota Banjar	Kab. Nganjuk		

Total: 103

Pada pelaksanaan tahun 2012, Kabupaten/Kota yang berinsiatif untuk menyusun Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) berjumlah 103 kabupaten/kota dan tersebar di 26 provinsi. Bila digabungkan dengan penyusunan SSK di kota pilot yang dimulai sejak tahun 2006, maka telah ada 224 kabupaten/kota yang merintis jalan Menuju Kabupaten/Kota SenSanitasional.

Saat ini, Pokja AMPL Nasional yang tengah berkoordinasi dengan Misi Midterm Review (MTR) atas pendampingan USDP bagi penyelenggaraan PPSP. MTR dimaksudkan untuk memperoleh masukan mengenai evaluasi pelaksanaan PPSP dan kinerja dampingan USDP tahun 2010-2011. Sebagai pemilik program PPSP, Pokja AMPL Nasional juga mengamanatkan kepada PMU-PIU untuk secepatnya menyusun *logical framework* PPSP dan USDP. Hal ini dimaksudkan sebagai alat kuantifikasi atas seberapa besar manfaat PPSP yang telah dirasakan oleh penyelenggara di daerah dan sejauh mana PPSP telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan RPJMN 2010-2014 sektor sanitasi.

Iman Utomo
Sekt. PMU PPSP

Malam Penganugerahan MDGs Awards 2011

INDONESIA MDG AWARDS 2011
Balai Kartini Convention Center
Jakarta, 31 Feb - 1 Mar 2012

Kantor Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs mengadakan Indonesia MDGs Awards 2011 (IMA 2011). Penghargaan ini diadakan secara rutin sebagai salah satu upaya untuk mendorong pencapaian 8 sektor MDGs dalam bentuk apresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi. Penghargaan ini dibagi menjadi empat untuk kategori umum, yakni: Nutrisi; Kesehatan Ibu dan Anak; Akses ke Air Minum Layak dan Sanitasi; serta HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya. Sedangkan untuk kategori khusus juga dibagi menjadi empat, yakni: Alokasi Anggaran yang Berpihak pada MDGs; Kesinambungan Program MDGs; Dampak MDGs pada Komunitas; dan Inovasi Terbaik MDGs untuk Kelompok Pemuda.

Malam puncak penganugerahan penghargaan IMA 2011 ini dilaksanakan hari Rabu malam, 1 Februari 2012 bertempat di Balai Kartini, Jakarta. Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono, hadir dalam malam penganugerahan ini didampingi oleh beberapa menteri kabinet. Setiap menteri tersebut didaulat untuk memberikan salah satu kategori umum penghargaan IMA. Agung Laksono memberikan penghargaan IMA untuk kategori nutrisi, Linda Amalia Gumelar memberikan penghargaan untuk Kategori Kesehatan Ibu dan Anak, Gamawan Fauzi untuk Penghargaan Kategori HIV/AIDS dan Penyakit Menular.

Untuk penghargaan kategori umum sektor Akses ke Air Minum Layak dan Sanitasi diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto. Mereka yang dinyatakan berhak diserahi penghargaan kategori umum dalam sektor Akses Air Minum Layak dan Sanitasi adalah Kabupaten Wonosobo dari golongan pemerintahan kabupaten/kota, Satoe Indonesia dari Organisasi Pemuda/Mahasiswa, HIPPAM "Seger Waras" Pasuruan dari LSM, dan PT. GE Indonesia dari golongan swasta.

Sedangkan Wapres Boediono menyerahkan penghargaan untuk kategori khusus dimana Kota Payakumbuh dinyatakan menjadi salah satu pemenang untuk inovasi dalam sektor Akses Air Minum Layak dan Sanitasi. Payakumbuh dinilai berhasil dalam meningkatkan anggaran kota, untuk melayani kebutuhan dasar air minum dan sanitasi masyarakatnya.

[kiri-kanan] Direktur P2LP Cipta Karya PU, Syukrul Amien dan Dirjen Cipta Karya PU, Budi Yuwono sedang mengunjungi stan Pokja AMPL

Sebelum malam puncak penghargaan, diadakan Festival Nasional MDGs. Pokja AMPL Nasional juga berpartisipasi dalam kegiatan pameran di festival IMA tahun ini yang diselenggarakan dari tanggal 31 Januari sampai 1 Februari 2012. ***Kelly - Sekt. Pokja AMPL***

Wakil Presiden, Budiono berfoto bersama pemenang kategori khusus di ajang IMA 2011
foto-foto: Sekretariat Pokja AMPL

NAWASIS

Integrasi Sistem Monitoring Air Minum dan Sanitasi

Untuk meningkatkan akses dalam pencatatan atau pemantauan terhadap jumlah investasi air minum dan sanitasi, Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan suatu sistem monev berbasis internet yang disebut NAWASIS.

NAWASIS atau *National Water Supply and Sanitation Information System* diinisiasi oleh Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas pada akhir tahun 2009 dengan tujuan untuk melakukan pemantauan sektor air minum dan sanitasi untuk mengevaluasi kinerja sektor AMPL.

NAWASIS merupakan hasil kerjasama Pokja AMPL dengan WASAP E (*Water Supply and Sanitation Sector Monitoring Support*) yang didukung oleh Pemerintah Belanda melalui *Water and Sanitation Program* (WSP) Bank Dunia.

National Water Supply and Sanitation Information System kemudian diperkenalkan sebagai *NAWASIS Monitoring Information System (*MIS) Module. NAWASIS MIS *Module* merupakan integrasi dari sistem informasi yang dikembangkan oleh Tim WASAP E dan *Urban Sanitation Development Project* (USDP).

Dalam perjalanannya NAWASIS MIS *Module* telah berkembang dimana tidak hanya akan memberikan informasi *input, output, outcome* dan program dari sektor Air Minum Sanitasi secara nasional kemajuan pencapaian, tetapi direncanakan juga sebagai alat untuk menentukan alokasi program DAK, hibah air minum, MDGs dan informasi mengenai Indeks Sanitasi Perkotaan dan Indeks Air Minum.

Berakhirnya kegiatan WASAP E pada Desember 2011 menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Diantaranya adalah pengelolaan NAWASIS MIS *Module* dimasa yang akan datang dan strategi pengembangannya. Karena itu pada 21-22 Desember 2011, Tim WASAP E menginisiasi pertemuan dengan Tim USDP dan Tim WASPOLA *Facility* agar pengembangan NAWASIS MIS *Module* dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang direncanakan/target yang ditetapkan.

Pertemuan yang diselenggarakan di Hotel Manhattan tersebut diikuti oleh peserta dari Tim USDP, Tim WASPOLA Facility dan Tim WASAP E. Pertemuan dihadiri juga oleh Maraita Listyasari dan Wahanudin dari Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas serta Martin Albrecht dari Bank Dunia. Pertemuan berjalan dengan difasilitasi WASPOLA *Facility*.

Pertemuan yang berjalan dua hari tersebut diawali dengan penjelasan mengenai gambaran umum NAWASIS oleh Hendra Murtidjaja dari WASPOLA *Facility* dan dilanjutkan dengan *sharing* pembelajaran yang telah dipetik selama proses pembangunan sistem selama lebih kurang dua tahun yang dipaparkan oleh Bowo Marsono dari Tim WASAP E dan Hendra Gupta dari Tim USDP. Pertemuan dilanjutkan dengan identifikasi kondisi eksisting sistem dan pembahasan isu-isu proyeksi NAWASIS SIM *Module* dimasa depan.

Dalam pertemuan ini, dibuat rencana kerja berdasarkan 4 kelompok isu utama, yaitu: Kelembagaan, Pelatihan, *System Improvement dan* Advokasi.

Penentuan penanggungjawab dan pelaksana atas apa yang telah disepakati diserahkan kepada Direktorat Permukiman dan Perumahan Bappenas sebagai pengelola USDP, WASAP E dan WASPOLA *Facility*.

Pelaksanaan pertemuan tersebut memperlihatkan bahwa sinergi di tingkat proyek tidak mustahil dilakukan. Potensi sinergi dengan proyek-proyek lain seperti PAMSIMAS, CWSH dan STBM juga masih sangat terbuka. Sinergi tersebut tentu saja tidak terlepas dari komitmen para pihak terutama Pokja AMPL Nasional.

Sani Prawirakoesoema - Technical Manager Proyek WASAP-E

Tampak para peserta lokakarya *foto:Sani*

STBM Lakukan Monitoring Berbasis SMS

Sejak diluncurkan situs STBM oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada 13 Oktober 2011 lalu, Kementerian Kesehatan melalui sekretariat STBM mulai melaksanakan sistem monitoring berbasis SMS (*Short Message Service*) via situs STBM melalui telepon selular. Untuk tahap awal di tahun 2012 ini, monitoring berbasis SMS dilaksanakan di 500 Puskesmas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Alat bantu monitoring ini menggunakan teknologi SMS yang dikirim oleh sanitarian/bidan/kader atau seorang yang ditunjuk oleh Puskesmas untuk melakukan pemantauan perkembangan akses jamban di wilayah kerja Kecamatan/Puskesmas yang dikirimkan ke SMS server di sekretariat STBM.

Sistem ini sebenarnya sudah dimulai sejak pelaksanaan program TSSM (*Total Sanitation – Sanitation Marketing*) di Jawa Timur. Saat itu dirasakan adanya perbedaan antara data yang dikumpulkan dan dikirim oleh sanitarian ke Dinas Kesehatan setempat.

Pengiriman data menggunakan SMS dirasakan begitu efektif, dan tidak memberatkan para sanitarian, karena terkadang pelaporan oleh sanitarian juga dilakukan melalui telepon/handphone atau SMS. Sejak saat itu TSSM mulai mengembangkan sistem monitoring berbasis SMS yang di uji cobakan dan dikaji di beberapa wilayah sasaran TSSM di Jawa Timur.

Manfaatnya cukup membantu. Seperti di Jombang misalnya, saat ini di setiap pertemuan sanitarian mereka dapat menganalisa data perkembangan akses walaupun masih dengan cara sederhana.

Di Pacitan, sistem monitoring berbasis SMS ini pun mulai dilaksanakan di daerah pilot, di tiga kecamatan ODF (*open defecation free*). Pada Rakornas STBM pertama Oktober 2011 lalu, Kabupaten Pacitan menjadi narasumber dalam *video conference* dengan Menteri Kesehatan untuk melaporkan perkembangan akses sanitasi di wilayahnya.

Walaupun belum semua kabupaten/kota di Jawa Timur menerapkan sistem ini, namun sistem ini terbukti cukup efektif yaitu proses pengiriman data yang cepat, tepat dan mudah untuk di verifikasi. Komitmen dari para pelaku tetap menjadi tumpuan berhasil atau tidaknya sistem monitoring ini, karena sistem SMS monitoring ini hanyalah alat manajemen untuk mendukung mekanisme pelaksanaan monitoring di wilayah sasaran.

Saat ini sistem monitoring berbasis SMS sedang disiapkan untuk dilaksanakan di tingkat pusat, melalui dukungan SMS *gateway*, server dan aplikasinya. Artinya, kabupaten/kota tidak perlu menyiapkan aplikasi SMS *gateway* di kantor Dinas Kesehatan, karena server yang berada di Sekretariat STBM telah disediakan untuk menampung data SMS yang masuk dari seluruh wilayah di Indonesia. Data hasil monitoring ini akan disatukan dalam sistem *website* STBM, sehingga semua pihak dapat memantau perkembangan akses sanitasi di Indonesia.

Sistem ini ke depannya akan mendukung keperluan data di website Kementerian Kesehatan dan mendukung informasi bagi pemantauan yang dilakukan oleh UKP4 (Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan). Sistem ini dipersiapkan juga untuk diintegrasikan dengan sistem pemantauan berbasis web lainnya yang dikelola oleh Pokja AMPL Nasional seperti NAWASIS (*National Water and Sanitation Information Services*) dan PAMSIMAS. ***disarikan dari tulisan Effentrif & Amin Robiarto - WSP World Bank dari stbm-indonesia.org***

Laporan Terkini

Dana Hibah UNICEF Ditargetkan Terserap 25%

Pemerintah Indonesia bertekad menyerap 25% anggaran yang bersumber dari dana hibah UNICEF. Kesepakatan ini muncul dalam pertemuan Pembahasan Rencana Serapan Kegiatan Tahun Anggaran 2011/2012 Program Kerjasama RI-UNICEF 2011-2015 yang diadakan pada hari Senin (9/1/2012) di Bappenas. Acara yang dimotori oleh Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat (KGM) Bappenas ini dibuka oleh Dr. Hadiat, selaku Direktur KGM Bappenas, dan dilanjutkan dengan tinjauan rencana serapan anggaran di masing-masing Pokja dalam Program Kerjasama RI-UNICEF.

Kegiatan-kegiatan hibah yang dikelola oleh Bappenas akan mempengaruhi capaian kinerja Kementerian PPN/Bappenas oleh karena itu, pertemuan ini penting dilaksanakan agar setiap pelaku (Pokja) dapat merencanakan dan merealisasikan program-programnya secara optimal.

Pada tahap awal disarankan agar setiap Pokja merencanakan kegiatan Kuartal I yang dapat menyerap 25% dari keseluruhan anggaran di tahun 2012. Dari pertemuan ini diketahui bahwa tidak seluruh dana hibah UNICEF dikelola Bappenas. Terdapat K/L anggota Pokja yang menerima transfer langsung dari UNICEF. Hal ini mendorong Bappenas untuk mengembangkan sistem yang lebih baik dalam memantau kemajuan program-program yang dikelola oleh anggota Pokja baik secara substansi maupun administrasi, terlebih kegiatan K/L di luar pokja-pokja dalam Program Kerjasama RI-UNICEF.

Mengingat serapan dana UNICEF yang dikelola oleh Pokja AMPL Nasional merupakan yang terbesar diantara Pokja-Pokja lainya, Direktorat KGM berharap agar Pokja AMPL dapat membantu target penyerapan keseluruhan program kerjasama RI-UNICEF. ***Hoferdy – Sekt. WASH UNICEF***

Profil

Menengok Pengusaha Sanitasi Desa Karang Bayan

Desa Karang Bayan terletak di Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, desa yang didominasi oleh dataran dan perbukitan ini berpenduduk 4.777 jiwa. Salah satu pengusaha sanitasi yang ada di Kabupaten Lombok Barat adalah Asiyah Sanjaya. Sebelum memulai usaha sanitasi (jamban), pria 36 tahun ini memiliki usaha pembuatan dan penjualan paping blok, gorong-gorong serta batako. Kini usahanya telah sukses dengan omset sebesar 60 juta perbulan.

Asiyah Sanjaya
foto: Rini

Peluang usaha sanitasi ini mulai dilirik Asiyah Sanjaya pada tahun 2008, bersamaan dengan program CLTS (*Community Lead Total Sanitation*) yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Lombok Barat dengan dukungan Program Unicef. Pada saat itu permintaan untuk jamban telah mencapai 650 unit. Harga rata-rata penjualan dan pemasangan adalah Rp 800.000,-.

Pria yang memiliki hobi berkebun ini sangat ulet, terlihat ketika Beliau menjelaskan tentang perjalanan usahanya. "Tidak ada strategi pemasaran khusus yang saya jalani, masyarakat mengetahui usaha saya ini bisa dikatakan dari mulut ke mulut dan bantuan informasi dari Bapak Kepala Dusun," ungkap bapak dua anak ini saat diwawancarai.

"Saya sangat bersyukur telah mengikuti beberapa pelatihan yang berkaitan dengan pemasaran sanitasi yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. Kami langsung diberikan ilmu oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya," ujar pengusaha kelahiran Dusun Persesak Timur ini.

Dikatakan, sebenarnya yang diuntungkan dari kegiatan pelatihan yang diadakan pemerintah ini adalah para pengusaha. "Kita sangat dibantu dengan adanya pelatihan sanitasi marketing, apalagi saya yang sebelumnya tidak pernah memikirkan strategi pemasaran karena terbiasa menunggu orderan, namun bisa dibayangkan jika ada yang mempromosikan dan membantu dalam hal pemasaran maka keuntungannya pun pasti berlipat ganda. Selain omset yang meningkat derajat kesehatan masyarakat kita juga ikut meningkat, karena sudah tidak ada lagi yang buang air besar sembarangan", ungkapnya. ***Baiq Rini S - Fasilitator WASH UNICEF Kabupaten Lombok Barat***

Investasi AMPL di NTT Butuh Rp 7,5 Triliun Hingga 2015

Mama Tamar, ibu dua anak itu berjalan tertatih sambil membawa dua buah jerigen air. Setiap hari, sedikitnya dua kali, ia harus berjalan kaki tidak kurang dari 1 kilometer untuk mengambil air bersih di sumur terdekat dari rumahnya. Kadang ia harus mengambil air sambil menggendong anaknya yang baru berumur dua tahun.

Mama Tamar

Di rumahnya, ia tidak memiliki jamban, bahkan yang paling sederhanapun. "Biasanya di kebun," begitu jawaban singkat Mama Tamar ketika ditanya dimana ia membuang hajat. Potret kehidupan di salah satu desa di NTT yang pernah saya kunjungi itu, menggambarkan kondisi pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Bumi Flobamora ini.

Sulitnya akses pada kebutuhan dasar seperti yang dialami oleh Mama Tamar juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di NTT. Data yang dirilis oleh BPS menyebutkan bahwa baru 49,29 persen masyarakat di NTT yang dapat menikmati akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak. Sedangkan untuk akses berkelanjutan terhadap sanitasi yang layak, Provinsi NTT menempati posisi kedua terendah dari 33 Provinsi di Indonesia, yaitu baru mencapai 26,23 persen, jauh dibawah rata-rata nasional yang mencapai 55,53 persen. Fakta lain mengenai kondisi sanitasi dasar adalah satu dari lima keluarga di Provinsi NTT masih melakukan Buang Air Besar di sembarang tempat (*Riskesdas, 2010*).

Merujuk tulisan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT (Pos Kupang, 3/12/2011), dibutuhkan anggaran baik APBN maupun APBD sebesar 7,5 trilyun rupiah, atau rata-rata 1,5 trilyun rupiah pertahun agar Provinsi NTT dapat mencapai target MDGs (*Millennium Development Goals*) dibidang AMPL pada tahun 2015. Faktanya anggaran APBN dan APBD untuk bidang AMPL belum dapat mencukupi kebutuhan yang ada. Di tahun 2011, total anggaran sektor AMPL di seluruh NTT tidak lebih dari 200 milyar rupiah.

Defisit anggaran dapat dipenuhi melalui penggalian potensi sumber pembiayaan non-pemerintah. Hal paling penting untuk pemenuhan defisit anggaran adalah komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di 21 kabupaten/kota di NTT.

Pembangunan AMPL, seperti diamanatkan dalam PP 38/2007 telah menjadi kewajiban daerah. Oleh karena itu diperlukan beberapa langkah strategis untuk menggugah dan meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs dibidang AMPL.

Pembangunan AMPL yang ditekankan adalah pembangunan yang tanggap akan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut dapat terjamin jika pelibatan masyarakat dilakukan secara penuh, dari proses perencanaan hingga pembangunan maka pengelolaan sarana paska konstruksi dapat berjalan dengan baik. Bukti nyata telah terlihat di berbagai desa di NTT, dimana masyarakatnya mampu mengelola sarana AMPL dengan baik melalui pengumpulan iuran bulanan. Bahkan beberapa kelompok pengelola sarana tersebut memiliki tabungan hingga puluhan juta rupiah. Informasi yang cukup bagi masyarakat mengenai pilihan teknologi sarana AMPL juga menjadi poin penting keberhasilan pembangunan AMPL. Hal ini menghindari penawaran pilihan teknologi yang tidak tepat yang tidak mampu dikelola oleh masyarakat, karena membutuhkan biaya perawatan dan pemeliharaan yang mahal.

Pelibatan masyarakat, pendirian kelompok pengelola sarana dan pilihan teknologi yang diinformasikan merupakan beberapa langkah strategis yang dilakukan dengan serius dapat membuka peluang percepatan pembangunan sektor AMPL. Kebutuhan dana sebesar 1,5 trilyun pertahun mungkin tidak dapat terpenuhi seluruhnya, tetapi melalui kehadiran Pokja AMPL, terdapatnya dokumen perencanaan AMPL yang komprehensif, strategi dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kemampuan pemerintah daerah, proses pembangunan AMPL akan lebih terencana dan terkoordinasi dengan baik. Pembangunan AMPL harus dijadikan sebagai prioritas, jika tidak, nasib Mama Tamar yang setiap hari harus memikul air sejauh 1 kilometer dan buang air besar di kebun akan diwariskan kepada anak-anaknya hingga puluhan tahun yang akan datang.

Wisnu Wardana - Fasilitator Kelembagaan Pokja AMPL NTT

Bersama-sama warga lainnya mengambil air
foto: Wisnu

Publikasi

POKJA AMPL

BUKU

- Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP: Materi Bidang Drainase
- Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP: Materi I Bidang Sampah
- Diseminasi dan Sosialisasi Keteknikan Bidang PLP: Materi II Bidang Sampah
- Gambar Tipikal Standar Sarana Air Minum dan Sanitasi: Program Nasional Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Tahun 2011 - WSLIC-3/Pamsimas

PETUNJUK

- Buku Pedoman bagi Tenaga Penanganan Limbah: Pengelolaan Limbah Medis: Konsep, Teknologi dan Pelatihan - BHM-002
- Kumpulan Modul Kursus Hygiene Sanitasi Makanan & Minuman
- Panduan Pelaksanaan Program RW Siaga Plus+, Integrasi Peningkatan Air Bersih, Sanitasi dan Perilaku Kebersihan untuk Menurunkan Kekurangan Gizi pada Balita: Buku 1 Pelaksanaan Promosi Perubahan Perilaku. Buku 2 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Air dan Sanitasi
- Pedoman Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Manlak STBM), Jakarta 2011
- Pedoman Pengawasan B3 dan Limbah B3 Pelabuhan Laut
- Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 519/MENKES/SK/VI/2008
- Petunjuk Teknis Pelaksaan Kegiatan Tingkat Masyarakat
- Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat
- Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Replikasi

Agenda AMPL Februari 2012

- Pertemuan Koordinasi Pokja AMPL (Bappenas)
- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pokja AMPL ke Daerah (Bappenas)
- Pertemuan Perencanaan dan Implementasi Strategi Advokasi (Bappenas)
- Pertemuan Koordinasi Kebijakan Nasional Program AMPL di Daerah (Bangda, Kemdagri)
- Lokakarya Nasional Penjaringan Minat PPSP 2013 (PMU PPSP)
- Sosialisasi (Kick Off Meeting) Pelaksanaan PPSP 2012 (PIU Teknis PPSP)
- Pendampingan Penyusunan Buku Putih, SSK dan MPSS (PIU Teknis PPSP)
- Pelatihan PF/CF IUWASH (PIU Teknis PPSP)
- Pelatihan Pokja Provinsi, Kab/Kota IUWASH-PPSP (PIU Teknis PPSP)
- ToT Tingkat Lanjut Program PPSP Anggota PMU dan PIU (PIU Bangda)
- Lokalatih Penguatan Pokja AMPL Nasional (Waspola Facility)
- Lokakarya Rencana Uji Coba Kemitraan dengan PNPM (Waspola Facility)
- Koordinasi Stakeholders dalam rangka Konsolidasi dan Koordinasi Progam Pamsimas (Pamsimas - Kemkes)
- Pertemuan Pembahasan Media Komunikasi AMPL
- Pertemuan Anggota Jejaring AMPL

Untuk informasi lebih lengkap dapat langsung dilihat di http://www.ampl.or.id atau http://digilib-ampl.net

Anda juga dapat bergabung dalam milis AMPL [milis_ampl@yahoogroups.com]

Kami juga menerima tulisan berita yang terkait AMPL, kirimkan tulisan Anda ke *pokja@ampl.or.id* atau *redaksi@digilib-ampl.net*

Tulisan yang terpilih akan di muat dalam newsletter cetak tiap bulannya.

Diterbitkan oleh: Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Nasional sebagai media informasi pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia | Pengarah: Nugroho Tri Utomo | Pimpinan Redaksi: Maraita Listyasari | Staf Redaksi: Aldy Mardikanto, Nur Aisyah Nasution, Hendra Murtidjaja, Nissa Cita A, Lisa Imrani, Kelly Ramadhanti | Desain: Meddy CH | Alamat Redaksi: Sekretariat Pokja AMPL, Jl. RP Soeroso No. 50, Gondangdia Lama, Menteng - Jakarta 10350 | Telp/Fax: (6221) 31904113, 31903909 | Email: *pokja@ampl.or.id* | Website: *http://www.ampl.or.id*

Didukung oleh: unicef